

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur:

- Adrinus, Pito Toni dkk. 2006. *Mengenal teori-teori politik dari sistem politik sampai korupsi*. Bandung: Nuansa.
- Ashiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- _____. 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*.
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Beddy, Maksudi Iriawan. 2016. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Busroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiarjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam dan Ibrahim Ambong. 1993. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers dan AIPI.
- Budiarjo, Miriam. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Dan, Nimmo. 2005. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- David, Easton. 1988. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara.
- Djafar, TB. Massa. 2015. *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)*. Yogyakarta : UII Press.

- _____. 2013. *Pemilukada (Rekonstruksi Demokrasi Lokal Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Giddens, Anthony. 1998. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hanida, Rozidetano P. *Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya*, Universitas Andalas.
- Hidayat, Imam dan Achmadur Rifa'i Hari. *Mengenal Tugas Fungsi dan Kewenangan DPRD*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikhsan, Darmawan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang: Alumni.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma. 1963
- Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marbun, S.F. 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4.
- Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Marjuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- MD, Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.

- Poernomo, Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranawijaya, Usep. 1983. *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih. 2009. *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soemantri, Sri. M. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Bulan Bintang.
- Sastroadmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang; IKIP Semarang Press.
- Sadu, Wasistiono dan Yonathan Wiyoso. 2009. *Meningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamuji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryaningrat, Bayu. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsyudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajagrafisindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tjandra, W. Riawan. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa Marga*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6396).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26).

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7).

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 56).

C. Artikel:

Oktaviani, Eka. *Etika Peserta Pemilu: Pendidikan Etika Politik di Indonesia Melalui Kampanye Positif dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol II No. 3, 2016.

Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, "Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara)" Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1.

D. Internet:

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

Anonymous. 2011. *Tentang Metode Penelitian*. <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> diakses 27 Oktober 2019

Tribunnews.com, Wajah Baru DPRD Kabupaten Purbalingga Disumpah, diakses pada tanggal 28 Februari 2020 dari <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/19/wajah-baru-dprd-kabupaten-purbalingga-disumpah-bupati-harapkan-bisa-sinergi-majukan-daerah>

